

PERAN KOMITE SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-FITYAN GOWA

Ahmad Yani

***Abstract :** This study aimed at discovering the description of the roles of school committee as advisory agency, supporting, controlling, mediator, and examining the effectiveness on the implementation of the roles of the committee at integrated Islamic Junior School (SMP IT) Al-Fityan Gowa. The result of the study revealed that (1) the roles of the school committee at SMP IT Al-Fityan Gowa based on the aspect of education qualification and the number of school committee was considered capable to run the roles based on four indicators as advisory agency, supporting, controlling, mediator. However, the fact was different with the reality which revealed that the school committee was categorized as minim to due to several factors, among others were: a) lack of socialization as the roles and functions of school committee to parents of representative of parents, society and stakeholder, b) the committee was yet supportet by other organization as AD/ART and office space, and c) the committee was mostly busy with other activities in other place which gave contribution on the implementation of the roles of the committee; (2) the effectiveness of the roles of the committee based on the indicators of the implementation of the roles of committee was on the stage of parcitipated in providing consideration in terms of giving feedback and ratification on RAPBS, and RKS/RPS as well as providing financial support of BPP Monthly. As is role as a controller, the comite merely monitor the implementation of the school program and the result of the learning; whereas, its roles as a mediator ws merely conducted when it related to the mediation between the parent and the school.*

***Keywords :** Roles, School Committee*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam membangun dan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi yang sarat dengan tantangan sekaligus peluang yang diakibatkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, sehingga disadari bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu dalam suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan. Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa manusia dalam kehidupannya membutuhkan

pendidikan olehnya itu pendidikan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari seluruh unsur terkait baik pemerintah, masyarakat, orang tua/wali siswa, maupun *stakeholder* lainnya.

Menyadari akan hal tersebut, maka baik pemerintah dan masyarakat dituntut untuk terus berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya, dan tentunya hal tersebut tidak akan dapat terwujud jika tidak ditopang oleh penerapan prinsip dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang baik dan berkesinambungan dari pihak lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah. Salah

satu strategi yang dapat digunakan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah yakni dengan melibatkan masyarakat dalam pendidikan.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Saat ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dari masing-masing belum berjalan secara optimal, terutama peran serta masyarakat yang dirasakan kurang diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada setiap individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama.

Menurut Tilaar (2002:27) “Penyelenggaraan pendidikan harus mengikut sertakan masyarakat oleh sebab masyarakatlah yang menjadi *stakeholders* yang pertama dan utama dari proses pendidikan tersebut”. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk mutu pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat setempat. Sekolah merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terjadi transformasi semua sumber daya dengan satu muara yakni terwujudnya layanan pendidikan dan pembelajaran, seiring dinamika dalam dunia pendidikan. Keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Berbagai fenomena yang muncul setelah konsep komite sekolah diimplementasikan ternyata bertentangan dengan hakekat makna yang terkandung dalam konsep itu sendiri. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali

Hanafiah Muhi yang berjudul “Eksistensi Komite Sekolah”, mengemukakan hal sekaitan dengan keberadaan komite, sebagai berikut: 1) Secara umum keberadaan komite sekolah belum tampil sebagai lembaga mandiri yang merepresentasikan kepentingan stakeholder dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah, 2) Secara umum stakeholder (orang tua murid) belum mengetahui dan memahami secara utuh keberadaan dan fungsi komite sekolah, 3) Keberadaan komite sekolah belum menampilkan diri sebagai sosok mitra kerja kepala sekolah dalam penyelenggaraan dan memajukan pendidikan di satuan pendidikan, dan 4) Pola pikir dan pola tindak sebagian pengurus dan anggota komite sekolah masih terkooptasi dengan peran dan fungsi BP 3 dimasa lampau. Stakeholder belum berperan serta (berpartisipasi) secara aktif dalam pembentukan komite sekolah, dan Komite sekolah secara umum belum berperan dan berfungsi secara optimal.

Menurut Rivai & Murni (2010:615), mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata sebagai berikut : *Pertama*, Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen; *Kedua*, Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara *birokratik-sentralistik* sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat; *Ketiga*, Peran warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Secara yuridis formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat

komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan perannya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik seperti program pembelajaran di kelas. Namun demikian, dalam perjalanannya kiprah komite sekolah belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi sebagai organisasi mitra sekolah dalam membantu program pendidikan sesuai dengan rencana. Hal di atas sejalan dengan realitas yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah dalam kata sambutan Modul Pemberdayaan Komite Sekolah menyatakan bahwa : “Secara kualitatif, keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah memang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan dan hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya minimnya komunikasi antara lembaga penyelenggara pendidikan dan *stakeholder* dalam hal ini masyarakat, yang berakibat kurangnya pemahaman akan pentingnya peran komite sekolah. Permasalahan tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Komite Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah “Bagaimana Karakteristik Komite Sekolah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa”. Adapun penjabaran dari fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran peran komite sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa?
2. Bagaimanakah efektivitas peran komite sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa?

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran peran komite sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa.
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas peran komite sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yakni penelitian metode kualitatif yang bersifat deskriptif yakni jenis penelitian yang menggambarkan tentang suatu gejala, kondisi dan situasi yang ada. dimana penelitian ini secara spesifik berusaha mengungkap fenomena yang entitas yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci tentang peran komite sekolah pada SMP IT Al-Fityan Gowa.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yakni pada karakteristik organisasi komite sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa, adapun penggunaan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang menjadi penjabaran dari fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Peran komite sekolah
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, terdiri dari :
 - a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
 - b. Badan Pendukung (*supporting agency*)
 - c. Badan Pengontrol (*controlling agency*)
 - d. Penghubung (*mediator agency*)
2. Efektivitas peran komite sekolah adalah sejauhmana komite sekolah dapat menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan indikator

peran dengan berorientasi kepada pencapaian visi, misi dan tujuan dari sebuah organisasi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah ketua komite, dan untuk mendukung data utama dipilih beberapa sumber data yang terdiri dari Kepala sekolah, ketua yayasan Al-Fityan cabang Gowa, dan Guru. yang dipilih dengan menggunakan digunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data lain yang tidak kalah pentingnya adalah dokumen-dokumen sekolah yakni dokumen berupa buku, majalah/buletin sekolah, notulen rapat, dan foto dokumentasi bukti berupa sarana fisik seperti bangunan maupun laporan kegiatan proses pembelajaran yang didapatkan dari pihak sekolah maupun pengurus komite.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diterima mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menyimpulkan hasil penelitian. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan pengujian kredibilitas data penelitian, melalui cara triangulasi dan *membercheck*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai (1) Gambaran peran komite sekolah di SMP IT Al-Fityan Gowa. Yang meliputi perannya sebagai: pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung, (2) Gambaran Efektivitas peran komite sekolah SMP IT Al-Fityan Gowa.

1. Gambaran Peran Komite Sekolah di SMP IT Al-Fityan Gowa

Pada bagian terdahulu dikemukakan bahwa pengurus komite SMP IT Al-Fityan Gowa terbentuk pada awal tahun 2011. Dimana pada awalnya pendiriannya pada tahun 2009 komite sekolah masih

menyatu antara ketiga satuan pendidikan yang dinaungi yayasan Al-Fityan Gowa yakni TK IT, SD IT, dan SMP IT Al-Fityan Gowa dan baru pada bulan November 2011 baru terbentuk komite SMP IT

Al-Fityan Gowa secara mandiri dalam artian tidak lagi tergabung dengan komite TK IT dan SD IT Al-Fityan Gowa. Hal tersebut sesuai dengan lampiran II, Kepmendiknas poin 2 yang menyatakan bahwa Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggaraan pendidikan, atau karena pertimbangan lain. Bertolak dari hal tersebut, maka komite sekolah yang pertama terbentuk sudah sejalan dengan acuan pembentukan komite sekolah.

Dalam petunjuk teknis acuan operasional kegiatan dan indikator kinerja komite sekolah, Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan artinya pembentukan Komite Sekolah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel artinya proses pembentukan Komite Sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demokratis artinya proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Dalam hal proses pembentukan Komite sekolah dimana SMP IT Al-Fityan Gowa, mengadakan rapat atau pertemuan dengan pihak sekolah, yayasan, dan orang tua wali dan

selanjutnya memilih pengurus komite sekolah melalui pemilihan pengurusan Komite SMP IT Al-Fityan Gowa pada Tahun Pelajaran 2011-2012. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 197 ayat (6) yang menyatakan bahwa Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Komite sekolah SMP IT Al-Fityan telah memiliki struktur organisasi komite yang cukup lengkap dan telah memiliki *draft job description* (uraian pembagian tugas) dan tata-hubungan antar personil, karena hal tersebut sangat memengaruhi pelaksanaan perannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Haryadi, dkk. (2006:9) mengemukakan bahwa salah satu perangkat organisasi Komite sekolah yang harus ada, sehingga organisasi dapat berjalan adalah struktur organisasi dan uraian tugas (*job description*), karena dengan uraian tugas yang jelas pengurus komite sekolah akan mengerti tugas dan tanggung jawabnya menurut jabatannya dalam organisasi.

Fasilitas ruangan kerja atau ruang sekretariat komite adalah salah satu faktor yang mendukung kinerja Komite sekolah dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dan rutinitas komite sekolah. Proses administrasi setiap kegiatan berlangsung di sekretariat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Haryadi, dkk (2006:9) yang menyatakan bahwa perangkat organisasi Komite sekolah yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite sekolah salah satunya adalah adanya fasilitas penunjang seperti kantor atau sekretariat dan kalau perlu ada tenaga administrasi). Belum dimilikinya ruangan kerja/sekretariat komite sekolah menyebabkan kurangnya koordinasi yang baik antara pengurus komite dengan pengurus lainnya, maupun pengurus

dengan pihak sekolah dan yayasan serta orang tua siswa. Walaupun hal tersebut telah diantisipasi oleh pihak sekolah dengan yayasan dengan menerapkan kebijakan yakni diharuskan kepada orang tua siswa untuk mengantar dan menjemput peserta didik (anak-anak masing-masing). Namun hal tersebut ternyata belum cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan peran komite disebabkan banyaknya orang tua maupun keluarga yang hanya sekedar mengantar dan menjemput tanpa melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat terhadap diri anaknya seperti berkonsultasi dengan guru/wali kelas mengenai perkembangan maupun hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan diri anaknya.

Komite sekolah merupakan wadah masyarakat sekolah yang mempunyai kepentingan dengan keberadaan sekolah dengan pelbagai kebutuhannya. Dengan kata lain komite sekolah adalah organisasi yang mewadahi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Peduli dalam arti berkepentingan secara positif untuk menjadikan sekolah sebagai wahana pembelajaran siswa yang efektif dan efisien dengan pemenuhan segala aspek kebutuhan pendukungnya. Sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan yang tidak mungkin berjalan segala program yang telah dibuatnya tanpa keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari pihak masyarakat. Komite sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 adalah sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, yang dibentuk sesuai usaha untuk meningkatkan mutu, pemerataan

dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta. Keberadaan Komite sekolah memiliki beberapa peran dan fungsi yang bertujuan sebagai organisasi yang mewadahi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dikemukakan di atas, maka komite sekolah memiliki peran dan fungsi sebagai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, Komite sekolah berperan sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Jadi, dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan mutu layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. berdasarkan hal tersebut, maka setelah dilakukan penelitian di SMP IT Al-Fityan Gowa dapat dikemukakan peran komite sekolah berdasarkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan.

2. Gambaran Efektivitas Peran Komite Sekolah di SMP IT Al-Fityan Gowa

Efektivitas peran komite ditinjau berdasarkan indikator pelaksanaan peran komite sekolah baru pada tahap berpartisipasi dalam memberikan pertimbangan berupa masukan dan pengesahan terhadap RAPBS, dan RKS/RPS serta memberikan dukungan

dana berupa iuran BPP setiap bulannya, begitu juga dengan perannya sebagai pengontrol hanya sebatas memantau pelaksanaan program sekolah dan hasil pembelajaran sedangkan perannya sebagai mediator hanya dilakukan apabila terkait dengan mediasi dengan orang tua dengan pihak sekolah sedangkan untuk mediasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan kalangan usaha dan industri masih dilaksanakan oleh pihak yayasan berkoordinasi dengan sekolah, dan komite hanya menerima pertanggung jawaban dari pelaksanaan program yang telah dituangkan baik dalam RAPBS, maupun RKS/RPS. hal tersebut disebabkan karena komite belum memiliki perangkat organisasi seperti AD/ART, program kerja, dan ruang kerja komite, selain itu kurangnya sosialisasi dan komunikasi juga turut memberikan andil terhadap minimnya pelaksanaan peran komite. Hal tersebut sejalan dengan diungkapkan oleh Dharma, S. (2005) (dalam Ali Hanafiah Muhi, 2012:9) dalam artikel *Eksistensi Komite Sekolah*, yang mengemukakan bahwa “bagaimana mungkin komite sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, jika fasilitas kantor tidak ada, honorarium tidak ada, dana operasional tidak ada, lembaga dibentuk tanpa dibekali dengan perangkat dan power yang memadai”.

Telah diuraikan pada pembahasan terdahulu dimana Komite SMP IT Al-Fityan Gowa resmi terbentuk pada tahun 2011 belum dapat menunjukkan dokumen AD/ART, hal ini adalah salah satu faktor penyebab sehingga peran dan fungsi komite sekolah belum berjalan dengan baik, selain karena belum adanya dokumen AD/ART menyebabkan pengurus komite tidak tahu harus berbuat, karena memang di dalam AD/ART tercantum tentang dasar, tujuan dan kegiatan Komite, hal ini menyebabkan tidak ada pegangan atau acuan yang kokoh untuk dapat mengembangkan organisasi komite sekolah dan tidak mengetahui tupoksinya.

Selanjutnya, fasilitas penunjang kinerja komite di sekolah seperti fasilitas ruangan kerja untuk pengurus komite juga sangat penting, karena hal ini akan memotivasi pengurus komite untuk bekerja, bahkan ada sekolah yang ruang kerja komite yang berfungsi sebagai sekretariat dilengkapi dengan staf tata usaha. Dengan adanya ruangan kerja komite akan terciptanya interaksi antara pengurus komite yakni keterlibatan mereka dalam berkomunikasi dan bekerjasama sehingga tercipta kebersamaan sehingga akan terbentuk tim kerja yang solid dan efektif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Haryadi, dkk (2006:11) menyatakan bahwa membangun tim yang efektif dalam sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi kebersamaan di dalam tim. Oleh karena itu perlu dibangun sistem kebersamaan, yaitu membangun sebuah *teamwork* yang efektif. Sejalan dengan pendapat tersebut Arismunandar (2008:45) mengemukakan, tim yang efektif dibangun dari keterampilan dan kemampuan individu yang bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, Guna membangun kerjasama tim diperlukan pemahaman bersama bersama terhadap tujuan, kesatuan komitmen, saling percaya, komunikasi yang baik, keterampilan yang memadai, kepemimpinan yang baik dan dukungan internal dan eksternal.

Dengan adanya ruang kerja komite di sekolah, maka komite diharapkan akan dapat memantau perkembangan sekolah sehingga dapat menjalankan perannya terutama sebagai badan pengontrol (*controlling*) yakni mengontrol serta memantau pelaksanaan program sekolah. Begitu juga dengan perannya sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) seperti memberi masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran, dimana masukan tersebut merupakan dari hasil pemantauan.

Efektivitas peran komite ditinjau berdasarkan indikator pelaksanaan peran

komite sekolah baru pada tahap berpartisipasi dalam memberikan pertimbangan berupa masukan dan pengesahan terhadap RAPBS, dan RKS/RPS serta memberikan dukungan dana berupa iuran BPP setiap bulannya, begitu juga dengan perannya sebagai pengontrol hanya sebatas memantau pelaksanaan program sekolah dan hasil pembelajaran sedangkan perannya sebagai mediator hanya dilakukan apabila terkait dengan mediasi dengan orang tua dengan pihak sekolah sedangkan untuk mediasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan kalangan usaha dan industri masih dilaksanakan oleh pihak yayasan berkoordinasi dengan sekolah, dan komite hanya menerima pertanggung jawaban dari pelaksanaan program yang telah dituangkan baik dalam RAPBS, maupun RKS/RPS. hal tersebut disebabkan karena komite belum memiliki perangkat organisasi seperti AD/ART, program kerja, dan ruang kerja komite, selain itu kurangnya sosialisasi dan komunikasi juga turut memberikan andil terhadap minimnya pelaksanaan peran komite.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang mempengaruhi peran komite sekolah, diantaranya:

- a. Belum adanya AD/ART sebagai dokumen-dokumen sebagai pedoman pelaksanaan peran komite sekolah yang menyebabkan minimnya informasi yang dimiliki sekaitan dengan peran dan fungsi komite.
- b. Belum tersedianya fasilitas ruangan kerja/sekretariat untuk Komite sekolah
- c. Kesibukan para pengurus komite sekolah yang berasal dari orang tua siswa maupun dari pihak guru yang juga selaku anggota komite.
- d. Minimnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga orang tua/wali siswa dan stakeholder lainnya tidak mengetahui arti pentingnya komite sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi-kondisi komite sekolah di SMP IT Al-Fityan Gowa tersebut di

atas, menyebabkan komite sekolah belum dapat menjalankan perannya dengan efektif terkait empat perannya berdasarkan Kepmendiknas Nomor : 44/U/2002 meliputi perannya sebagai : 1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityan Gowa mengenai peran komite sekolah, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Gambaran peran komite sekolah di SMP IT Al-Fityan Gowa ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan dan struktur kepengurusan dipandang mampu menjalankan perannya berdasarkan keempat indikator pelaksanaan peran komite sekolah yakni pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan, dimana peran komite berdasarkan kajian yang dilakukan terkait pelaksanaan peran komite sekolah di SMP IT Al-Fityan dikategorikan minim, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : (1) kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua/wali siswa, dan stakeholder lainnya mengenai peran dan fungsi komite sekolah, (2) komite sampai saat ini belum didukung perangkat organisasi lain seperti AD/ART dan ruang kerja, dan (3) kesibukan pengurus yang sebagian besar bekerja di

tempat lain juga turut memberikan andil terhadap terhadap efektivitas pelaksanaan peran komite.

Efektivitas peran komite ditinjau berdasarkan indikator pelaksanaan peran komite sekolah baru pada tahap berpartisipasi dalam memberikan pertimbangan berupa masukan dan pengesahan terhadap RAPBS, dan RKS/RPS serta memberikan dukungan dana berupa iuran BPP setiap bulannya, begitu juga dengan perannya sebagai pengontrol hanya sebatas memantau pelaksanaan program sekolah dan hasil pembelajaran sedangkan perannya sebagai mediator hanya dilakukan apabila terkait dengan mediasi dengan orang tua dengan pihak sekolah terkait pelaksanaan program yang akan diselenggarakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arismunandar, 2008. *Perilaku Organisasi dalam Pendidikan*, Makassar: Badan Penerbit UNM
- Danim, Sudarwan. 2010, *Otonomi Manajemen Sekolah* ; Bandung, Penerbit CV. Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003 : *Acuan Operasional Kegiatan dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta: Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007-2009*. Jakarta: Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.

- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Muhi, Ali Hanafiah. 2012. Eksistensi Komite Sekolah. (<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/KOMITE-SEKOLAH.pdf>), 15 Juni 2012)
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Riduwan, 2009, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Rivai & Murni, 2010. *Education Manajemen (Analisis Teori dan Praktik)*, Jakarta, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sagala, Syaiful. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat : Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: PT. Nimas Multima.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.
- _____, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaifuddin, M, Wuriyanto A.B, Fatimah, S.S, Efendy, M.M., & Anshory, I.AM, 2008 : *Manajemen Berbasis Sekolah (Bahan Ajar Cetak)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011. *Manajemen Pendidikan* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Usman, Husaini 2010, *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* Edisi 3 Jakarta Timur, Bumi Aksara.
- Yadi Haryadi Anen Tumenggung Arief Rahadi, 2006, *Pemberdayaan Komite Sekolah Bahan Pelatihan untuk Fasilitator Inti Komite Sekolah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Modul)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manajemen Pendidikan.
- *) Penulis adalah Staf pada kantor Kopertais Wilayah VIII Makassar**

